

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara merupakan suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan atau kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang kuat maupun lemah. Negara juga merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan, sehingga diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.¹

Selain itu, negara memiliki batasan peran dan fungsi, antara lain, hukum dalam suatu negara merupakan kerangka dan batas kehidupan masyarakat. Satu wilayah negara harus dikuasai satu lembaga, tidak lebih. Norma-norma kelakuan yang ditetapkan oleh negara berlaku definitif. Selain itu, negara harus memilikipengakuan. Baik dari luar, maupun masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut. Pengakuan masyarakat terhadap wewenang negara untuk menetapkan hukum dan untuk menjamin keberlakuannya termasuk hakikat negara. Negara tidak hanya sistem kekuasaan, akan tetapi negara bisa berkuasa karena masyarakat bersedia untuk mengakui wewenangnya.

Mekanisme demikian ini memberikan peluang bagi Negara untuk merespon dan memenaj dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan supaya keadaan Negara ini dapat diakui serta peran Negara sebagai penengah dalam permasalahan masyarakat begitu

¹ Inu Kencana Syafie, Ilmu Politik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 86.

kelihatan. Dalam sebuah Negara pastinya ada yang menjalankan roda berlakunya sebuah pengaturan Negara sehingga tidak terjadi stagnasi keberadaan Negara dalam masyarakat. Hal ini menuju kepada kekuasaan. Kekuasaan ini lebih mengarah kepada pengaturan dalam menata masyarakat sehingga terjadi kehidupan yang harmonis.

Kekuasaan merupakan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkahlaku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadisesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.² Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunan dalam pemerintahan. Makna pokok dari kekuasaan yaitu hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif, dan dapat dihitung hasilnya.

Dalam negara, wajah kuasa atau kekuasaan dapat menjadi suatu hubungan, yaitu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak-pihak lain untuk melakukan hal yang sebenarnya. Pengertian ini merujuk pada kuasa atas orang lain. Kuasa seseorang atas orang lain akan terjadi secara timpang. Kuasa ini terjadi ketika seseorang menciptakan secara rutin dampak-dampak yang lebih besar atas orang lain, namun tidak terjadi. Maka disinilah relasi kuasabekerja atau berada. Berbeda dengan Marx yang berpendapat bahwa negara adalah alat dari kelas yang berkuasa, kelas yang menguasai alat-alat produksi, untuk menindas kelas-kelas yang lain. Karena itu yang diperlukan adalah kemenangan kelas yang tidak mempunyai, yang baru tanpa negara, setiap orang akan bekerja untuk kepentingan bersama sesuai dengan kemampuannya dan setiap orang akan mengambil bagian dari milik bersama sesuai dengan kebutuhannya.³

² Miriam Budiardjo, Konsep Kekuasaan; Tinjauan Kekuasaan dalam Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 9.

³ Frans Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Model (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 170.

Padahal Negara berfungsi sebagai lembaga pusat pemersatu masyarakat. Fungsi dasar dan hakiki negara sebagai pemersatu masyarakat adalah penetapan aturanaturan kelakuan yang mengikat, saling menghormati hak-hak asasi antar idivid dan masyarakat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan tentram dalam suatu negara. Maka Ibn Khaldun berpandangan untuk menjalankan fungsinya, negara harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Dengan kriteria seorang yang berilmu, adil, mampu, sehat, dan dari keturunan Quraisy.

Kepala negara yang akan memimpin bangsa Indonesia haruslah orang yang memiliki integritas keilmuan yang tinggi. Mustahil seorang dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal jika tidak mempunyai perangkat keilmuan. Kontekstualisasi dari syarat 'dari keturunan Quraisy' adalah bahwa kepala negara atau pemerintah harus mempunyai kewibawaan dan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Suatu pemerintahan yang tidak legitimate akan mendapatkan kendala dalam menjalankan tugasnya. Bagi Ibnu Khaldun, idealnya suatu negara berdasarkan nilai Islam secara formal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia juga tidak menutup realitas bebrapa negara yang dapat berkembang secara progresif, mandiri, dan mencapai kesejahteraan tanpa harus berasaskan Islam secara formal.

Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara yang plural, multikultural, dan multireligius, tidak mutlak harus berdasarkan Islam tetapi nilai-nilai Islam yang menjadi ruh (soul) dan jiwa (spirit) dari peraturan dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.⁴ Maka tidak heran jika sebuah Negara dalam menjalankan perekonomian hidup masyarakat, mekanisme kekuasaan sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bidang perekonomian.

⁴ Muhammad Sobary, "Dialog Intern Islam: Ukhuwah Islamiyah" dalam *Passing Over* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 74.

Ekonomi adalah persoalan yang tidak mungkin lagi bisa kita pungkiri dalam kehidupan ini karena hampir setiap aktivitas keseharian manusia pasti bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Sehingga untuk mengingat maupun mempelajari persoalan ekonomi, kita tentunya membutuhkan pengetahuan mengenai pemikir-pemikir ekonomi untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun pertimbangan dalam menyelesaikan setiap persoalan ekonomi yang dihadapi. Jika kembali mengingat sejarah pemikiran ekonomi, pada muasalnya kita akan flashback pada awal hadirnya Islam di dunia. Namun kali ini kita tidak akan membahas sejarah awal dari pemikiran ekonomi karena pasti rentetannya akan sangat panjang jika dijelaskan tetapi fokus artikel ini adalah membahas tokoh-tokoh pemikir ekonomi jauh setelah Islam datang. Dalam lintasan sejarah umat Islam di dapati banyak sekali tokoh yang membicarakan persoalan ekonomi seperti Ibnu Khaldun. Tokoh ini merupakan pemikir ekonomi Islam yang cukup terkenal hingga sekarang dan secara sosiologis keduanya turut membangun teori-teori atau konsep ekonomi.

Karena Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. Maka jika mengacu hal tersebut dalam pemikiran Ibn Khaldun tentang Kekusaan pasti memiliki ugensinya antara pemerintah dalam hal ini yang mengatur dengan ekonomi, supaya perjalanan ekonomi tersebut berjalan lancar dengan semestinya, apalagi Ibnu Khaldun adalah sosok tokoh yang juga menyoroti tentang kedua tema tersebut.

Disisi lain ajaran Islam memiliki ajaran tentang sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya. Dalam ajaran Islam memiliki pandangan syariat yang membentuk pandangan dunia dan sekaligus menentukan sasarannya serta strategi yaitu Maqasid asy-syari'ah yang juga didasari tentang konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan (falah), dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah), dan menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosial ekonomi dan kebutuhan spiritual. Hal ini disebabkan karena adanya umat manusia memiliki kedudukan yang sama dimata Allah dimuka bumi dan sekaligus hamba-hambanya, yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan bathin, kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materil dan spiritual. Tujuan syari'at mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan falah dan hayatan thayyibah dalam batas-batas syari'at.⁵

Melihat itu semua jelas kaitannya kekuasaan sebagai penopang segala urusan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi memberikan sebuah perekonomian yang stabil sehingga keberlangsungan kehidupan dan toleransi masyarakat semakin besar. Maka tidak heran jika dalam pemikiran Ibn Khaldun tentang kekuasaan dan ekonomi perlu ditelisk lagi karena ketika sebuah pemikiran dituangkan dalam sebuah karya pastinya ada keterkaitan satu karya dan karya lain, apalagi ini terdapat dalam satu buku hanya yang membedakan adalah temanya mungkin ada persamaan dan pandangan dalam kaitannya ekonomi politik ketika itu supaya kehidupan masyarakat menjadi relevan.

Di tinjau dari segi moneter, negara Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sudah berlangsung beberapa tahun. Tingginya tingkat krisis di negara kita ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Inflasi telah

⁵ M. Umer Chapre, Islam dan tantangan Ekonomi, trj Ikhawan Abidin, Islam and Economic Challenge, Cet ke- 1 (Jakarta: Gema Isnani Press, 2000), hlm, 7

mengurangi tabungan, mengurangi investasi, lebih banyak aliran modal ke luar negeri, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Situasi ini tidak boleh dipertahankan dan tidak boleh memaksa pemerintah untuk menetapkan kebijakan untuk mengatasinya. Kebijakan moneter mencerminkan arah sistem pasar dengan menerapkan sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. Artinya, fokus pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke peran pemerintah yang lebih kecil. Tujuan pembangunan bukan lagi sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan⁶.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ekonomi Politik Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia”.

B Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah yang penulis paparkan maka rumusan masalah yang akan penulis telaah adalah:

1. Bagaimana Konsep politik ekonomi Ibnu khaldun?
2. Bagaimana peranan negara terhadap sistem ekonomi dalam pandangan Ibnu Khaldun?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah: Untuk mengetahui

1. Bagaimana konsep politik ekonomi Ibnu khaldun

⁶ Mahasiswa Universitas Satyagama Fakultas Ekonomi Ferian Andreas, “*BERBAGAI HAMBATAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER INFLATION TARGETING*,” *Scribd.Com*, last modified 2010, accessed April 14, 2022, <https://www.scribd.com/doc/25127523/Berbagai-Hambatan-Dalam-Penerapan-Kebijakan-Moneter-Inflation-Targeting>.

2. Peranan negara terhadap sistem ekonomi dalam pandangan Ibnu Khaldun

D Kajian Pustaka

Sebelum membahas masalah kekuasaan pemerintah dan ekonomi Ibnu Khaldun setidaknya harus memperjelas posisi penelitian yang dilakukan ini supaya dapat meposisi karya ini dengan karya-karya yang berkaitan dengan Ibnu Khaldun. Untuk itu Penulis memaparkan beberapa tulisan atau karya yang berkaitan atau yang telah ada sehingga supaya tidak ada kesamaan dalam pembahasan kajian ini.

Dalam Karakteristik Pemikiran Ibnu Khaldun yang ditulis oleh Hasaruddin dengan memaparkan tentang ide pemikirannya khususnya tentang politik, dalam pemikirannya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa Politik dalam pemikiran Ibn Khaldun merupakan suatu hal yang mulia dan terhormat, yang hanya dimiliki oleh manusia saja, sebagai makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini suatu makhluk lain yang berpolitik, sebagaimana halnya yang terdapat di kalangan manusia. Karena itu hendaknya politik itu dihadapi dan didekati manusia dengan segi-segi terbaik yang dimiliki dirinya, bukan dengan segi-seginya yang terburuk. Segi-segi yang terburuk itu adalah apa yang dinamakan oleh Ibn Khaldun dengan sisa-sisa kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Kemudian Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang tugas manusia dalam bernegara yaitu berbuat sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama dan pembangunan dunia.⁷

Dalam Tulisan Samsul Nizar dengan judul “Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” pada tulisan ini Imenitik beratkan pada pentingnya Negara dalam kehidupan manusia serta menitik beratkan pada

⁷ Hasaruddin, *Karakteristik Pemikiran Ibnu Khaldun*, Jurnal AL-FIKR, Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010.

proses pembentukan Negara serta kriteria seorang pemimpin dalam suatu Negara, dengan tujuan supaya kehidupan dalam bersosial interaksi manusia satu dengan yang lain akan terjaga dan dapat terjamin kehidupannya.⁸

Jurnal yang ditulis Hafidz Hasyim dengan judul Watak dan Peradaban Epistemologi Ibn Khaldun dari penulisan jurnal tersebut menggunakan pendekatan Ibn Khaldun terhadap pemikiran sebelumnya dalam memaparkan fenomena dengan bersifat deskriptif dengan melihat proses transformasi sosial politik kekuasaan dapat disimpulkan bahwa Pemikiran Ibn Khaldun akan watak peradaban ditinjau dari sisi historis adalah gagasan oleh intelektual Islam sebelumnya. Ibnu Khaldun bermaksud mendirikan sosiologi untuk dijadikan metode penggalian kebenaran sejarah dengan tujuan untuk menggali kebenaran subyektif mungkin berdasarkan pengalaman dan dapat diterima dengan nalar logis dan empiris.⁹

Skripsi Hikma Hayati Lubis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pengembangan Masyarakat, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori structural fungsional dengan rumusan masalah bagaimana perkembangan Umat Islam menurut Ibnu Khaldun. Dalam teori tersebut menyatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen saling menyatu dalam keseimbangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah pertama menyoroti pemaknaan ashabiyah Ibn Khaldun yang disitu menjelaskan lebih detail lagi makna Ashabiyah dalam pengertiannya yaitu lebih kepada ruang lingkup Negara, kedua perubahan fenomena sosial dapat dijadikan bahan untuk melihat perubahan masyarakat kearah yang lebih baik, karena dalam

⁸ Samsul Nizar, *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jurnal Demokrasi Vol. II No.1 Th. 2003

⁹ Hasim Hafidz, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibn Khaldun*, Jurnal Humaniora Vol. 22 No. 3 Th. 2010

hal ini masih terdapat pemikiran Ibn Khaldun yang relevan dengan kehidupan masyarakat dewasa ini.¹⁰

Skripsi Khairul Taqwim yang berjudul *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam* dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dan relevansinya terhadap ekonomi Islam. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan teori Implementasi konsep ekonomi Islam dengan sifat penelitian deskriptif dan lebih mengarah menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa tegaknya ekonomi ada ditangan Negara dan dijalankan secara adil serta untuk kemashalahatan umat secara universal dengan adanya perbankan yang berbasis syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat teralisasi dalam bidang moneter serta menjadi jalan alternatif, sehingga pemikiran Ibn Khaldun dalam prinsip Islam menurut penulis sangat relevan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.¹¹

Pada Skripsi Muhammad Taufik dengan judul *Ide Demokrasi dalam Konsep Ashabiyah*, dalam tulisan ini menggunakan pendekatan Historis karena penelitian ini menyakut kajian sejarah dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistesisikan bukti-bukti guna menegakan fakta-fakta sehingga memperoleh kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsep ashabiyah cocok untuk kontek demokrasi karena ashabiyah mengandung nilai-nilai syar'i yaitu dalam penyelenggaraan Negara tidak mengabaikan pertimbangan akal dalam menentukan kebijakan kemashalahatan umat, selain itu dalam era demokrasi ini ashabiyah dapat diartikan sebagai sebuah partai politik untuk dijadikan alat menuju sebuah kekuasaan dalam ajang Pemilu atau Pemilukada. Dalam

¹⁰ Hikma Hayati Lubis *Pemikiran Ibn Khaldun tentang Pengembangan Masyarakat*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹¹ Khairul Taqwim, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

sistem Ashabiyah mengenal bentuk perwakilan hal ini sama dengan bentuk sistem demokrasi khususnya di Indonesia yang mengenal keterwakilan, sehingga seluruh elemen dapat ikut membangun Negara.¹²

Pada Skripsi Pemikiran etika Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah yang menggunakan metode pendekatan historis, dan ingin mengetahui tentang kekuasaan menurut Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyah, kensep etika politik keduanya serta perbandingan antara konsep pemikiran Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyah. Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dari konsep tentang kekuasaan menurut keduanya keberadaan kekuasaan atau Negara sebagai sebuah keharusan karena ini sudah menjadi kodrat manusia untuk saling hidup berdampingan, dengan tujuan semata-mata untuk Allah SWT. Kemudian Selain itu Ibn Taimiyah berpendapat bahwa pengamalan agama tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kekuasaan. Kemudian tujuan dalam kekuasaan adalah syariat.¹³

Buku Filsafat Sejarah Islam Ibnu Khaldun ditulis oleh Zainab Al-Khudari, buku ini menempatkan Ibnu Khaldun sebagai pengagas dasar ilmu sosial dengan mengkompirasikan pemikiran Adam Smith dibidang ekonomi, sedangkan dibidang Negara dikomparasikan dengan Ibnu Qutaibah al-Binawari dalam karyanya 'uyun alkhbar.¹⁴

Selain itu dalam bukunya Wendy Melfa dan Sholihin Siddiq dengan judul buku "Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam Study Epstimologi Pemikiran Ibnu Khaldun, isi dari buku tersebut menguraikan tentang pemikiran sosiologi Ibnu Khaldun dalam pengembangan Masyarakat Islam yang kemudian diterapkan dalam tiga aspek pemberdayaan yaitu pemberdayaan

¹² Muhammad Taufik, Ide Demokrasi Dalam Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008

¹³

¹⁴ Asep Sholahuddin, Pemikiran etika Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

dan pembinaan pada matra ruhaniah, intelektualitas dan pemberdayaan dalam matra ekonomi.¹⁵

Maka melihat karya-karya diatas belum ditemukannya konsep kekuasaan dan ekonomi menurut Ibn Khaldun untuk itu menurut penulis masih dirasa perlu untuk menelaah lebih lanjut tentang ekonomi dan kekuasaan dalam pandangan Ibnu Khaldun dengan melihat korelasi antar keduanya sehingga penulis dapat menyajikan penulisan tentang kekuasaan politik dan ekonomi Ibnu Khaldun dalam dinamika politik. Disisi lain penelitian ini dianggap relevan karena dari pemaparan karya tersebut menunjukan ugensi antara perkembangan politik di era abad pertengahan dengan perkembangan politik modern masih berkesinambungan walapun bentuk dan mekanisme perbedaan perilakunya berbeda dalam pemaknaannya, lebih-lebih yang berkaitan dengan politik ekonomi.

E Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dibutuhkan sebuah teori dalam mengupasnya sehingga penelitian tersebut akan mendapatkan hasil yang terarah. Untuk itu kaitanya membedah konsep Ibn Khaldun tentang politik ekonomi maka penulis mengawali dengan memaparkan tentang peran Negara dalam prespektif aliran Realisme. Dalam pandangan Realisme menyatakan Bahwa negara memiliki peran yang sangat aktif, karena negara memiliki agenda-agenda yang tidak dapat direduksi menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam wilayah pribadi (perekonomian)¹⁶ dengan merujuk pada otonomi negara, yang dipahami sebagai kemampuan negara untuk mendefinisikan semata-mata oleh kepentingan pribadi dari individu-individu dalam masyarakat. Definisi pendekatan yang berpusat pada negara sebagaimana yang diungkapkan

¹⁵ Zainab Al-Khudari, *Filsafat Ibn Khaldun*, terj. Ahmad Rafi Ustman (Bandung: PT.Pustaka,tt)

¹⁶ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 447.

penulis adalah memandang wilayah negara atau memandang bahwa agenda dari negara dan perekonomian juga merupakan agenda dari wilayah pribadi. Pengertian negara yang dikutip penulis mengutip seperti yang diungkapkan oleh Max Weber yang mendefinisikan Negara sebagai suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.¹⁷ Sedangkan dalam literatur lain Robert M. MacIver mengungkapkan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undnagannya melalui penguasaan (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.¹⁹

Penulis mengungkapkan bahwa pada dasarnya ide tentang otonomi negara merujuk pada kemampuan negara untuk bertindak secara independen dari factor-faktor sosial (terutama faktor ekonomi). Pandangan bahwa otonomi adalah kebebasan dari pengaruh “eksternal” memiliki tiga konsekuensi²⁰, yaitu: Pertama, adalah bahwa negara yang dikatakan bebas akan mampu “menang dalam melawan” tekanan-tekanan dari masyarakat sipil; Kedua, bahwa tindakan negara dipandang sebagai tidak dipengaruhi

¹⁷

¹⁸ H.H. Gerth and C.Wright Mills, trans., eds and introduction, *From Max Weber:Essays in Socilogy* (New York: Oxford University Press, 1958), hlm. 78. “The state is human society that (succesfully) claims the monopoli of the legitimate use physical force within a given territory”

¹⁹ R.M. Maclever, *The Modern State* (London: Oxford University Press, 1926), hlm. 22.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 49. 1

oleh satu kelompok manapun atau antarkelompok manapun; Ketiga, bahwa negara dianggap mampu menolak atau menahan tekanan dari luar.

Maka konsep nasional dalam pembangunan dibangun dengan independen tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain walaupun Negara juga harus bisa memproteksi diri dengan keberadaan-keberadaan pengaruh dari Negara lain yang bisa merusak konsep dan tujuan dari Negara tersebut.

Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan, (yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (Security) dan kesejahteraan (Prosperity) merupakan kepentingan nasional yang utama. Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan "tujuan nasional". Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.²¹

Artinya Negara berkepentingan dalam menyelamatkan Kepentingan nasional sebagai bagian dari alat supaya pengaruh Negara tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu permasalahan yang timbul di masyarakat menjadi kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional." Sedangkan

menurut Morgenthau, "Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin

²¹ T. May Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 116.

negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.²²

Melihat paparan diatas tentu dalam hal ini teori peran Negara dalam pandangan realis mempunyai peranan penting ketika Negara tersebut ada dan untuk kepentingan orang banyak, dengan berlandsakan kewajiban penyelenggara Negara dalam hal ini adalah pemimpin menjalankan kepemimpinannya tersebut sesuai aturan dengan tujuan untuk melayani masyarakat, sehingga akan terciptanya kehidupan yang aman adil dan makmur. Alur yang demikian ini menurut penulis cocok untuk menganalisa relevansi konsep pemikiran Ibn Khaldun tentang politik ekonomi, karena kekuasaan dalam hal ini sebagai alat untuk menyelenggarakan serta ekonomi adalah salah satu bagian dari implementasi dari kebijakan penguasa, sehingga akan diketahui bagaiman keefektifan relevansi kekuasaan dalam menjalankan ekonomi dalam di dinamika politik yang berjalan dengan sedemikian rupa.

F Sistematika Pembahasan

Penelitaian ini disusun dalam lima bab. Adapun hal-hal yang termuat pada bab-bab sebagai berikut:

1. Bab pertama, Pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini sebagai acuan dalam kelanjutannya.
2. Bab Kedua, menjelaskan tentang proses berjalannya kekuasaan dan hubungan antara politik dan kekuasaan data-data yang diperoleh dari letiratur yang ada. Dalam bab ini berisikan tentang, pemikiran Ibnu Khaldun dan hal yang mempengaruhi dari pemikiran yang ada,

²² Ibid.,

menggambarkan perkembangan politik serta ide-ide tentang kekuasaan, hubungan politik dan ekonomi.

3. Bab ketiga menjelaskan tentang relevansi kekuasaan dan ekonomi yang dipaparkan Ibnu Khaldun dengan perkembangan politik prinsip-prinsip bernegara prinsip-prinsip pengambilan kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi serta etika pengusaha dalam keterlibatan dalam pengambilan kebijakan politik dalam berdemokrasi yang benar dalam.
4. Bab empat, Islam memaparkan tentang data-data yang diperoleh tentang konsep ekonomi yang dijelaskan Ibn Khaldun, yang isinya memaparkan tentang perekonomian, mekanisme prinsip-prinsip dalam berinteraksi ekonomi yang benar.
5. Bab lima, sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.